

Analisis pembiayaan program pengendalian penyakit malaria di Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Aceh Tenggara tahun 2005-2007

Bahri, Samsul

Deskripsi Lengkap: <https://lib.fkm.ui.ac.id/detail.jsp?id=65897&lokasi=lokal>

Abstrak

Malaria merupakan penyakit menular yang masih menjadi masalah kesehatan di dunia. diperkirakan ± 1,5 juta - 2,7 juta jiwa meninggal setiap tahunnya. Di Indonesia Pada tahun 2002 dilaporkan ada 15 juta kasus klinis. Dilaporkan bahwa di beberapa daerah malaria masih endemis terutama daerah terpencil dan sebagian besar penderitanya dari golongan ekonomi lemah. Dari 21 kabupaten /kota di NAD, 66 % merupakan daerah endemis malaria. Kabupaten Aceh Tenggara yang merupakan daerah pegunungan dengan jarak 900 km dari ibu kota provinsi selama empat tahun berturut-turut mengalami kenaikan kasus malaria. Pada tahun 2003 tercatat 741 kasus, 2004 tercatat 531 kasus, 2005 tercatat 1.112 kasus dan 2006 tercatat 1.787 kasus kejadian malaria. Perhatian dunia terhadap malaria cukup besar. Hal ini ditandai dengan penandatanganan perjanjian antara Global Fund, pemerintah Jerman dan pemerintah Indonesia yang berbunyi menghapus hutang Indonesia sebesar 50 juta euro (600 milyar) dengan syarat setengah dari dana tersebut digunakan untuk program pemberantasan penyakit menular termasuk malaria. Program pemberantasan penyakit malaria merupakan pelayanan esensial yang harus disubsidi oleh pemerintah dalam upaya mencapai "kesehatan untuk semua" (health for all) sesuai dengan kemampuan Negara Indonesia. Diharapkan Dinas Kesehatan Kabupaten dapat mempengaruhi para pengambil keputusan di daerah untuk mendapatkan prioritas dana APBD Kabupaten guna membiayai program malaria. Penelitian ini ingin melihat anggaran program pemberantasan penyakit malaria di Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Tenggara pada tahun 2005 s/d 2007 dimulai dari proses perencanaan penerimaan anggaran dari berbagai sumber peruntukan anggaran tersebut, siapa pegelolanya dan bagaimana dukungan pemangku kepentingan. Penelitian ini merupakan penelitian operasional dengan pendekatan kualitatif dan kuantitatif yang bersifat deskriptif. Hasil penelitian menemukan pembiayaan program pemberantasan penyakit malaria di Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Tenggara pada tahun 2005 s/d 2007 menunjukkan hanya terdapat dua sumber yaitu APBD Kab dan BLN yang jumlahnya cenderung naik yaitu tahun 2005 Rp 314.480.000, tahun 2006 Rp 444.380.000 dan tahun 2007 Rp 2.806.450.000. Pembiayaan operasional hampir tidak ada perubahan dari tahun ketahun. Komponen biaya terbesar adalah pemberian kelambu sebesar Rp. 2.512.200.000. Biaya untuk kuratif sangat sedikit yaitu hanya Rp 86.970.000. selama tahun 2005 s/d 2007. Dari hasil wawancara mendalam dengan pejabat terkait diperoleh gambaran bahwa keinginan mereka untuk memberantas: penyakit malaria cukup tinggi hanya saja belum diikuti dengan jumlah anggaran. Penelitian ini menyarankan agar pengelola Program pemberantasan penyakit malaria Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Tenggara lebih aktif lagi mencari sumber pembiayaan lain, tidak hanya bertumpun pada sumber yang ada sekarang dengan cara membuat perencanaan yang tepat dan melakukan advokasi ke pemerintah daerah.

Malaria is a communicable disease that is still be one of health problem throughout the world. There are estimated ± 1,5 - 2,7 million people died every year because of malaria. It has been reported that there were 15 million cases in Indonesia in 2002. Malaria is still be an endemic disease in rural area and most of patients are the poor people. There are 21 districts in NAD and 66 % malaria. Aceh

Tenggara District is a mountainous area in the distance of 900 km from capital city. For 4 years malaria cases increased year to year. In 2003, it was recorded that there were 741 cases, 842 cases in 2004, 1.12 cases in 2005 and 1.787 cases in 2006. The international contribution toward malaria is great enough. The MOU between global fund, German and Indonesia has been signed, it stated they agreed to eliminate Indonesia debt at amount 50 million Euro (600 million) with a specific condition that half of that loan should be used to eliminate communicable disease including malaria. Malaria elimination program is an essential service subsidized by government to achieve "health for all" in accordance with government ability. It's expected that District Health Office (Dinas Kesehatan Kabupaten) could influence the district policy stake holder to get a priority budget from Annual district budget called "APBD" for malaria program. This study was aimed to describe the budget of malaria program in district health office in Aceh Tenggara in 2005 to 2007. This study enrolled the planning budgeting process, financing sources, agent, provider and beneficiary for malaria program. This study was on descriptive operational study with qualitative and quantitative approaches. The results of study showed that the sources of fund are District APBD and BLN. The funding tends to increase from Rp. 314.480.000 in 2005, Rp. 444.380.000 in 2006 to Rp. 2.806.450.000 in 2007. The major component of that funding was purchasing mosquito net and it cost 2.512.200.000. Curative funding component is only 86.970.000 from 2005 to 2007. The result of study recommended that the District Health Office (Dinkes) of Aceh Tenggara should proactively find others potential resources, not only depending on the available resources by making a better planning process and advocate district government.